DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

A. P. Parlindungan. *Konversi Hak-Hak atas Tanah*. 1990. Bandung: Mandar Maju.

Bachtiar Effendie. 1983. *Pendaftaran Tanah di Indonnesia dan Peraturan Pelaksanaanya*. Bandung: Alumni Kotak Pos 272.

Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Ke 16. Jakarta: Rajawali Press.

Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Cetakan Ke 19. Jakarta: Djambatan.

Boedi Harsono. 2005. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid 1. Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)*. Cetakan Ke 1. Bandung: Refika Aditama.

H. Ali Achmad Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

K. Wantijk Saleh. 1985. *Hak Anda atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Cetakan Ke 12. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Siti Rahma Mary Herwati. Dody Setiadi. 2005. *Memahami Hak Atas Tanah dalam Praktek Advokasi*. Surakarta: Cakrabooks.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Urip Santoso. 2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Cetakan Ke 1. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undang:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang Pemasukan Kepada Negara dalam rangka pemberian Hak atas Tanah dan Pendaftaran Haknya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapam Hak Guna Usaha.

Surat Laporan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Pemiliknya atau Kuasanya/Pengumuman Penguasa Perang Daerah Jawa Timur No. Perg P.2-8/1958, tertanggal 13-10-1958 berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt/Peperpu/011/1958 tanggal 14-4-1958

SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya, tanggal 5-5-1983 No. DA/C.211/SK/01/PR/1983, perihal Pendistribusian Tanah Negara bekas Hak Erfpacht Verponding No. 4267 dengan Hak Mlik pada masyarakat Curahnongko

SK Menteri Dalam Negeri No. 64/HGU/DA/86 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur kepada PT. Perkebunan (sekarang PT. Perkebunan Nusantara (Persero));

Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No. 540.35-7695 Tahun 2004 tentang Permohonan Jangka Waktu Pendaftaran HGU yang Terletak di Jember;

Surat Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas Penyelesaian Sengketa Lahan antara Warga Desa Curahnongko dan Curahtakir dengan PT. Perkebunan Nusantara XII Kalisanen (PTPN XII) No. 063/R/Mediasi/VII/2015.